

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian bagi suatu negara tidak terkecuali Indonesia. UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan UMKM untuk tetap *survive* ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Hampir 80% perusahaan yang dikategorikan ke dalam usaha besar mengalami kegagalan (Harapan dan YR, 2014).

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, upaya pemberdayaan dari sektor moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus diiringi oleh pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya pemberdayaan dari sektor riil. Ada tiga alasan yang mendasari mengapa UMKM sangat penting bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, yaitu (1) kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif; (2) sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui inovasi dan perubahan teknologi; (3) karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar (Rahayu, 2005).

Pengembangan UMKM sendiri suatu bentuk pemberdayaan melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Oleh sebab itu maka pengembangan UMKM perlu optimal karena keberadaan UMKM memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara Indonesia.

Dalam pengembangan UMKM, ada empat kendala besar yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM, yaitu keterbatasan modal kerja, SDM, inovasi produk dan teknologi serta pemasaran. Namun, yang sangat banyak terjadi di lapangan adalah masalah permodalan sehingga UMKM tidak berkembang. Alasannya adalah karena kesuksesan dari UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bergantung pada kemampuan para pengusaha dalam mengidentifikasi dan mengakses sumber daya-sumber daya dan modal yang memadai (Neeley & Auken, 2009). Atas dasar alasan tersebut, salah satu keputusan paling penting yang dibuat oleh para pengusaha adalah pendanaan untuk operasi perusahaan mereka (Neeley & Auken, 2005).

Pendanaan untuk UMKM sendiri ada dua cara yaitu secara internal dan secara eksternal. Saat perusahaan menggunakan sumber-sumber pendanaan internal, perusahaan bisa memilih untuk menggunakan simpanan/tabungannya sendiri, *cash flow* perusahaan atau laba ditahan. Jika perusahaan memutuskan untuk memilih sumber-sumber pendanaan eksternal, perusahaan bisa memilih diantara ekuitas, seperti sumber pendanaan dari modal ventura, *business angels*, modal pribadi atau utang, seperti pinjaman bank (Welter, 2011). Tetapi, meskipun terdapat banyak pilihan pendanaan, UMKM mengalami berbagai macam masalah dalam pencariannya terhadap dana untuk mendukung ide bisnis mereka, perkembangan, ataupun pertumbuhan perusahaan mereka (Feti & Dudele, 2015).

Pembiayaan modal dalam perusahaan kecil sangat sulit untuk didapatkan, mahal dan sering tidak diinginkan karena alasan-alasan tertentu (Cassar, 2004). Mayoritas dari *venture capital* dan *angel investment* cenderung kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan kecil dikarenakan potensi pertumbuhannya belum bisa diramalkan dan risikonya sangat tinggi. Bahkan bagi perusahaan kecil, untuk menggunakan modal pribadi pun akan sangat sulit dengan alasan para pemilik perusahaan kecil relatif belum berpengalaman (Cassar, 2004).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya, para pelaku usaha yang mengalami masalah permodalan tersebut memanfaatkan metode pembiayaan alternatif yang dikenal dengan *bootstrap financing* (Efrata, 2009). Penggunaan *bootstrap financing* ini sering digunakan pada saat perusahaan kesulitan untuk mendapatkan akses dari pihak eksternal untuk mendapatkan suntikan modal. Dalam hal ini, bisa dikatakan metode *bootstrap financing* dapat dipakai untuk mengisi kekosongan pada saat metode pembiayaan tradisional tidak tersedia bagi pengusaha kecil dan menengah (Winborg & Landstrom, 2000).

Bootstrap finance juga adalah sebuah cara untuk memenuhi kebutuhan pengusaha terhadap sumber modal serta sebagai metode dalam memperoleh sumber modal yang berbeda dari sumber-sumber formal seperti utang (Ebben & Johnson, 2004). Definisi *bootstrap financing* yang tidak mengandalkan pendanaan eksternal tersebut relevan dengan *pecking order theory* dalam teori struktur modal. *Pecking order theory* mengatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal dari pada eksternal perusahaan. Penggunaan dana internal lebih didahulukan dibandingkan dengan penggunaan

dana yang bersumber dari eksternal. Urut-urutan yang dikemukakan oleh teori ini dalam hal pendanaan adalah pertama laba ditahan diikuti dengan penggunaan hutang dan yang terakhir adalah penerbitan ekuitas baru (Myers, 1984).

Bootstrap financing menjadi sangat penting bagi sebuah usaha yang baru saat modal awalnya rendah, pendapatan rendah dan modal yang sulit untuk diperoleh karena usaha yang masih baru tersebut memiliki resiko yang tinggi (Starr & MacMilan, 1990). *Bootstrap financing* sendiri tergolong lebih mudah diperoleh karena relatif minim persyaratan dibandingkan dengan sumber-sumber modal tradisional (Ebben & Johnson, 2004).

Gender, usia dan tingkat pendidikan dapat menentukan pilihan *bootstrap* yang dibuat oleh seorang wirausahawan karena pengaruhnya terhadap keputusan bisnis (Watson, 2002). Ukuran perusahaan berhubungan dengan penggunaan *bootstrap financing*. Penggunaan *bootstrap financing* dilihat sebagai respon dari perusahaan kecil dalam menghadapi kesulitan pendanaan (Winborg & Landstrom, 2001)

Hasil penelitian Neeley dan Van Auken (2009) menyatakan bahwa perempuan cenderung menghindari resiko sehingga penggunaan metode *bootstrap financing* oleh perempuan lebih tinggi. Usia dari pemilik berpengaruh terhadap pengalaman wirausahawan untuk memperoleh dana dari berbagai macam sumber (Adler & Kwon, 2002). Wirausahawan yang lebih muda memiliki keterbatasan untuk mengakses modal dari sumber eksternal. Tingkat pendidikan seringkali berhubungan dengan penggunaan *bootstrap financing* (Neeley & Van Auken,

2010). Carter et. al (2003) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh pendanaan dari sumber eksternal seperti pinjaman bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Auken (2004) menemukan bahwa penggunaan *bootstrap* lebih tinggi pada perusahaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Hasil penelitian lain yang dilakukan Efrata dan Herdinata (2012) menunjukkan bahwa penerapan metode *bootstrap financing* sebagai metode pembiayaan alternatif pada UMKM di Surabaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, usia dan *gender*.

UMKM di Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki jumlah yang relatif tinggi. Berikut merupakan data jumlah UMKM di Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
		Usaha Mikro (Unit)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Menengah (Unit)	Total (Unit)
1	Kab. Lima Puluh Kota	271	4.973	43.679	48.923
2	Kab. Solok Selatan	40	913	8.925	9.905
3	Kab. Pasaman	69	3.121	25.351	28.541
4	Kab. Tanah Datar	285	5.772	37.556	43.613
5	Kab. Pasaman Barat	258	5.712	26.391	32.361
6	Kab. Pesisir Selatan	101	5.489	38.497	44.087
7	Kab. Solok	274	4.426	35.473	40.110
8	Kab. Padang Pariaman	292	4.574	37.474	42.340
9	Kab. Agam	301	4.635	42.561	47.497
10	Kab. Sijunjung	99	3.595	19.785	23.479

No	Kabupaten/Kota	Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
		Usaha Mikro (Unit)	Usaha Kecil (Unit)	Usaha Menengah (Unit)	Total (Unit)
11	Kab. Dharmasraya	84	2.906	12.797	15.787
12	Kab.Kep. Mentawai	25	246	2.924	3.195
13	Kota Padang	950	39.403	35.883	76.236
14	Kota Sawahlunto	110	2.106	8.923	11.139
15	Kota Padang Panjang	105	2.549	6.769	9.423
16	Kota Bukittinggi	681	8.714	18.953	28.348
17	Kota Payakumbuh	396	4.954	13.895	19.245
18	Kota Solok	257	2.951	8.712	11.920
19	Kota Pariaman	305	2.623	9.401	12.329
	Jumlah	4.876	109.662	433.940	548.478

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, tahun 2015

Pada tabel 1.1 dapat dilihat dari data terakhir dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015, bahwa jumlah UMKM yang ada di provinsi Sumatera Barat mencapai 548.478 unit. Sementara itu, kota Padang adalah kota yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang paling banyak dibandingkan kota-kota lain yang ada di provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 76.236 unit.

Pada Tabel 1.1 terlihat jumlah pelaku usaha (UMKM) di Kota Padang sekitar 76.236 unit UMKM. Jumlah ini setiap tahunnya pasti akan terus meningkat. Dengan data diatas, tentunya persaingan untuk mendapatkan akses terhadap sumber modal akan semakin ketat. Oleh karena itu, bagi para pelaku usaha perlu mempertimbangkan lagi keputusannya apabila ingin menggunakan sumber modal eksternal. Faktanya, UMKM memiliki akses yang terbatas terhadap modal eksternal karena banyaknya keterbatasan, seperti asimetri informasi, biaya

transaksi yang tinggi, *credit rationing* dan penilaian kredit yang buruk (Neeley & Van Auken, 2009).

Peneliti memilih objek UMKM karena UMKM menarik untuk dibahas terutama dari sisi permodalan/pendanaan, dan juga objek UMKM disini relevan dengan topik *bootstrap financing* yang akan peneliti bahas. Alasan lain peneliti memilih objek UMKM di Kota Padang adalah karena UMKM di Kota Padang memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan kota lainnya serta untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya karena lebih dekat dengan peneliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai penerapan metode *bootstrap financing* sebagai salah satu metode pembiayaan alternatif bagi UMKM, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan metode *Bootstrap Financing* pada UMKM di kota Padang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan metode *bootstrap financing* pada UMKM di kota Padang?
2. Bagaimanakah hubungan antara faktor demografi dengan penerapan metode *bootstrap financing* pada UMKM di kota Padang?

3. Bagaimanakah hubungan antara ukuran perusahaan dengan penerapan metode *bootstrap financing* pada UMKM di kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dan diidentifikasi diatas, maka diperoleh tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan metode *bootstrap financing* pada UMKM di kota Padang
2. Untuk mengetahui hubungan faktor demografi dengan penerapan metode *bootstrap financing* pada UMKM di kota Padang
3. Untuk mengetahui hubungan ukuran dengan penerapan metode *bootstrap financing* pada UMKM di kota Padang

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi individu untuk memberikan informasi bahwa pembiayaan untuk sebuah usaha yang baru didirikan bisa juga didapatkan dengan metode alternatif yaitu *bootstrap financing*.

B. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang relevan tentang implementasi metode *bootstrap financing* untuk para pelaku UMKM, sehingga pengembangan usahanya dapat dilakukan dengan lancar.

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini akan membahas mengenai Penerapan Metode *Bootstrap Financing* pada UMKM di Kota Padang. Fokus dari penelitian ini hanya pada penerapan metode *bootstrap financing* sebagai metode alternatif pembiayaan bagi UMKM di Kota Padang.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup landasan teori yang digunakan sebagai perbandingan untuk masalah yang diangkat berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi sampel dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variable penelitian, serta teknis analisis.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian yang digunakan, hasil pengolahan data yang telah diperoleh serta interpretasinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini membuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, serta memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian lainnya.

